

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Di saat dunia mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil langkah konservasi untuk menyelamatkan deforestasi yang sedang terjadi di Borneo, Indonesia sebagai negara berkembang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap sumber daya alam yang disediakan hutan Borneo. HoB merupakan salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam merespon tantangan global secara komprehensif dan terintegrasi, sementara dalam waktu bersamaan juga turut memanfaatkan peluang global untuk mencapai kepentingan nasional. Meskipun di permukaan tampak seolah tidak ada korelasi signifikan dengan politik dalam negeri—mengingat tata kelola hutan dalam negeri yang kacau-balau dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang bermukim di hutan Borneo—penulis menemukan substansi keterkaitan hubungan antara faktor domestik dan internasional terkait deklarasi HoB.

Alasan yang memotivasi pemerintah Indonesia melakukan perjanjian kerja sama konservasi dan pembangunan berkelanjutan di hutan Borneo adalah untuk melindungi kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tatanan internasional dan kepentingan ideologi. Berdasarkan penemuan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa melalui deklarasi HoB pemerintah dapat membuka peluang kerja sama dengan dua negara anggota lainnya

dan organisasi pemerintah maupun nonpemerintah untuk mengatasi persoalan domestik yang tengah dihadapi Indonesia dan membangun hubungan luar negeri yang baik, dengan penjabaran sebagai berikut:

- a) Dalam konteks kepentingan pertahanan, negara berupaya mengatasi kesenjangan pembangunan terhadap masyarakat pedalaman yang bermukim di kawasan perbatasan hutan Borneo Kalimantan yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan cara melakukan pendekatan kesejahteraan, seperti pembinaan serta pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan. Salah satunya dengan melakukan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat yang dapat dijadikan sumber pendapatan ekonomi alternatif berkelanjutan tanpa harus merusak lingkungan. Peningkatan taraf hidup masyarakat perlu dilakukan guna mencegah berbagai masalah sosial mendasar yang dapat mengancam stabilitas nasional, dikarenakan pada titik paling ekstrem masyarakat di kawasan perbatasan sangat rentan terhadap upaya-upaya separatis. Sementara itu keberadaan hutan Borneo yang terletak di kawasan perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia menjadikan hutan ini rentan terhadap kegiatan ekonomi ilegal dan ancaman kehilangan wilayah teritorial. Dengan merangkul ketiga negara pemilik hutan Borneo di bawah payung kebijakan HoB, diharapkan dapat tercipta kesamaan misi untuk pengelolaan hutan Borneo yang lebih baik di bawah paradigma konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Kepentingan pertahanan juga dapat diartikan sebagai upaya negara dalam menghadapi ancaman keamanan nontradisional seperti kerusakan hutan Borneo sebagai urat nadi yang tidak dapat dipisahkan

dari kehidupan masyarakat Indonesia. Menyelamatkan hutan yang masih tersisa, melakukan rehabilitasi dan restorasi terhadap hutan yang telah terdegradasi merupakan esensi dari inisiatif ini. Dalam *The Environmental Status Report of the Heart of Borneo 2012* yang merupakan laporan analisa WWF terhadap kondisi kesehatan lingkungan kawasan HoB—hampir keseluruhan tipe hutan di kawasan HoB kini berada pada status baik atau sangat baik. Kepentingan-kepentingan ini merupakan isu prioritas terkait deforestasi di hutan Borneo, ditunjukkan dengan sekuritisasi isu tersebut sebagai salah satu bagian dari KSN.

- b) Kepentingan ekonomi Indonesia merupakan upaya pemerintah dalam melakukan harmonisasi dan mengintegrasikan masterplan HoB dengan program pembangunan ekonomi nasional, salah satunya berkaitan dengan MP3EI yang telah menetapkan Koridor Ekonomi Kalimantan sebagai Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional. HoB memastikan aktivitas perekonomian tidak akan dilakukan dalam hutan bernilai konservasi tinggi; menawarkan pendekatan ekonomi hijau yang senantiasa melakukan tinjauan terhadap rencana pengelolaan konsensi yang telah menguasai hampir setengah dari kawasan HoB; mendorong konsensi tersebut berada di bawah sertifikasi pengelolaan pemanenan kayu, minyak sawit, dan pertambangan yang berkelanjutan; serta memperkenalkan mekanisme pasar karbon sebagai insentif yang dapat menjadi kompensasi pendapatan negara dalam menjaga kelestarian hutan Borneo.

- c) Terkait kepentingan tatanan internasional, deforestasi yang terjadi di hutan Borneo tentunya menimbulkan paradoks dengan keaktifan Indonesia dalam berbagai forum yang membahas isu-isu lingkungan. Maka dengan mendeklarasikan HoB, Indonesia akan memperoleh pengakuan dari masyarakat internasional sebagai negara yang peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup, sehingga akan tercipta hubungan yang baik dalam pergaulan internasional. Hal ini akan berdampak terhadap stabilitas regional maupun global yang lebih baik dan kondusif bagi akselerasi kepentingan domestik Indonesia; yaitu menciptakan pengelolaan sumber daya hutan Borneo yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan HoB.
- d) Alasan terakhir yang mendasari sikap pemerintah Indonesia berkaitan dengan kepentingan ideologi. Keterlibatan Indonesia dalam HoB merupakan wujud aktualisasi ideologi bangsa secara normatif dalam mempromosikan perdamaian dunia dan bekerja sama memerangi deforestasi sebagai sebuah isu global. Deklarasi HoB merupakan langkah politik lingkungan Indonesia pada tatanan global agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat internasional—guna menegaskan ideologi bangsa yang terpancar dalam segala tingkah laku dan perbuatan Indonesia—dalam usaha untuk memperkuat dukungan internasional terkait pelestarian lingkungan di Indonesia.

5.2 Saran

Kepentingan sebuah negara bukan hanya merupakan refleksi dari politik dalam negeri saja, tetapi juga hubungan luar negerinya. Berdasarkan latar belakang masalah

yang telah diuraikan sebelumnya, deforestasi yang terjadi di Borneo merupakan isu multidimensi yang menyentuh berbagai aspek penting dalam kehidupan manusia. Dengan status Indonesia sebagai pemilik kawasan hutan Borneo terbesar, pemerintah tentu tidak bisa berdiam diri mengingat isu lingkungan hidup merupakan salah satu isu strategis dalam hubungan internasional. Indonesia memiliki beban tanggung jawab yang besar agar mampu memenuhi tekanan dari dalam negeri dan menghasilkan kebijakan yang memberikan keuntungan di tingkat domestik; sedangkan pada tingkat internasional Indonesia harus mampu memenuhi tekanan internasional dan meminimalkan konsekuensi yang dapat merugikan hubungan luar negeri. Penulis menilai HoB secara konseptual merupakan sebuah skenario ideal yang dapat memberikan solusi terhadap benturan kepentingan di hutan Borneo tersebut. Namun agar pemerintah Indonesia dapat memainkan peranannya itu, maka diperlukan persiapan yang matang dengan memperhatikan peluang yang dimiliki dan tantangan yang dihadapi, serta bagaimana langkah strategis yang sebaiknya dilakukan sehingga deklarasi HoB tidak hanya untuk kehebatan pencitraan semata tetapi harus memiliki tujuan yang benar-benar dapat diperoleh segenap bangsa. Mengingat esensi dari kebijakan ini adalah keseimbangan konservasi dan pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi hijau, maka penulis juga menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat membahas tentang pencapaian dari implementasi kebijakan konservasi dan pembangunan berkelanjutan HoB di Indonesia.

